



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik kerja lapangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan magang, merupakan suatu program yang diadakan oleh pihak universitas untuk mendidik mahasiswa agar menjadi lulusan-lulusan yang mampu memahami dan siap dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dewasa ini, mahasiswa atau cenderung memilih tempat magang yang dinilai memiliki reputasi baik sebagai suatu bentuk kebanggaan tersendiri. Pada kenyataannya, banyak mahasiswa yang lebih memilih tempat magang di perusahaan swasta dari pada instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kinerja perusahaan swasta dinilai lebih baik dari pada instansi pemerintah.

Instansi pemerintahan adalah satuan organisasi milik pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewasa ini, instansi pemerintah cenderung dihadapkan oleh pandangan orang yang memiliki anggapan sendiri tentang jenjang karier di instansi pemerintah, salah satunya ialah masyarakat merasa bekerja di instansi pemerintah kurang memiliki gairah berkompetisi dalam bekerja. Alasan mengapa penulis mulai tertarik dan akhirnya memilih instansi pemerintah ialah bersumber dari rasa ingin mengetahui bagaimana transformasi sistem kerja di instansi pemerintahan. Melihat begitu kuat *stereotype* rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat membuat penulis semakin penasaran tentang kinerja instansi pemerintahan yang katanya kurang efisien.

Sejak itu penulis mulai mencari instansi pemerintahan yang kiranya tepat sebagai media untuk penulis dapat melakukan proses praktik kerja magang,

tentu harus sesuai dengan jurusan kuliah yang penulis tempuh. Berawal dari penulis mengajukan diri sebagai peserta magang di instansi pemerintah, setelah melewati beberapa rangkaian sampai akhirnya penulis diterima di instansi tersebut. Kemudian, penulis berubah pikiran untuk mengganti instansi pemerintah lain yang penulis rasa akan banyak belajar dan mendapatkan informasi di instansi pemerintah ini.

Andylala (2014, para. 1) menuliskan adanya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi mengambil sumpah dan janji Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/11).

Bedasarkan artikel diatas, semenjak kepemimpinan baru yang diberikan oleh Jokowi kepada Basuki Tjahaja Purmana (Ahok) memiliki dampak besar. Dapat dilihat dari begitu banyak sorotan awak media yang mulai membanjiri setiap harinya baik media televisi, cetak dan *online* berlomba-lomba meliput pemberitaan tentang gubernur baru DKI Jakarta. Awal kepemimpinan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, awak media sudah memberitakan tentang sosok gubernur yang katanya “kontroversial”. Namun, dilain sisi banyak yang mengemukakan sosok gubernur baru DKI Jakarta yang kontroversial terselip kinerja yang baik demi kemajuan DKI Jakarta.

Berawal dari konsentrasi media massa yang sering memberitakan tentang pemerintah provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), penulis merasa tertarik dengan Pemprov DKI Jakarta dan menyimpulkan ada hal yang lain dalam instansi pemerintahan Pemprov DKI Jakarta sekarang ini. Jika dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya, ditambah lagi dengan adanya artikel media *online* yang memberitakan bahwa Pemprov DKI Jakarta meraih 4 penghargaan.

Retaduari (2016, para. 7) menuliskan adanya penghargaan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Terbaik I Kategori Provinsi dengan

Perencanaan Terbaik, Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Progresif. Lalu satu lagi adalah Millenium Development Goals (MDGs) 2016 Terbaik I Kategori Tingkat Pencapaian MDGs Tertinggi Tahun 2015, Rabu (11/05).

Sejak saat itu, penulis semakin mantap memilih instansi pemerintahan ini yang penulis anggap berbeda sistem kerjanya dengan instansi pemerintah yang lain. Dapat dibuktikan dengan adanya program kerja baru yang diciptakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya ialah ingin mengubah Jakarta yang dikenal sebagai kota transisi/ (*trasiotioning city*) yang lekat dengan peningkatan urbanisasi, menjadi kota yang pintar dalam mengakomodir segala bentuk infrastruktur dan kebutuhan warga dengan menciptakan Jakarta Smart City.

Bedasarkan website resmi [smartcity.jakarta.go.id](http://smartcity.jakarta.go.id) (2017), menjelaskan bahwa Jakarta Smart City adalah pengaplikasian konsep *Smart City* yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya program baru yang diusung Gubernur Basuki (Ahok), nampaknya menjadi salah satu keunggulan bagi DKI Jakarta. Dengan mengubah sistem kerja instansi pemerintah yang kini berbasis *elektronik*, diantaranya termasuk *e-budgeting* yang sudah dijalankan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Melihat dari adanya pemikiran kuat yang muncul di masyarakat, mengenai reputasi instansi pemerintah yang kurang baik, karena adanya anggapan bahwa kinerja pemerintah yang kurang efisien. Padahal bukan hanya dari kinerja gubernur saja, melainkan hal yang terpenting lainnya ialah bagaimana Humas Pemprov DKI Jakarta yang bertugas menjembatani segala

bentuk informasi, mampu menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu dengan cara menjadi humas yang komunikatif dalam menyampaikan *Public Policy* yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Akibat *Public Policy* yang tidak tersampaikan dengan baik, membuat citra dari instansi pemerintah terkesan tidak cukup baik. Sehingga reputasi Pemprov DKI Jakarta dimata masyarakat cenderung kurang baik.

Miriam Budiarjo (2008, h.20) menjelaskan Kebijakan Publik/ *Public Policy* adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

Penyebaran informasi *Public Policy* tidak lepas dari salah satu fungsi dan tugas humas, yaitu sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber berita, baik berasal dari instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya, sehingga hubungan keduanya sangat berkaitan erat.

Jadi, dapat diartikan bahwa *Public Policy* merupakan sebuah ilmu administrasi publik, dimana para pemimpin atau pemegang kekuasaan berhak untuk melakukan ataupun tidak melakukan sebuah tindakan yang nanti akan berdampak kepada masyarakat umum.

Dalam hal ini pihak yang paling penting berperan tentu humas dari Pemprov DKI Jakarta, sejauh mana kinerja humas di instansi pemerintah yang mampu mendukung kualitas dari kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama tugas dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan dilakukan oleh Gubernur sebagai wujud transparansi kinerja, agar masyarakat menjadi semakin percaya terhadap kinerja gubernur yang telah dipilih.

Kinerja Humas Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam kegiatan sosialisasi publiknya sudah mencapai tahap yang dinilai bagus. Ini terbukti dengan banyaknya jenis media yang dilakukan dalam mendukung kegiatan sosialisasi kebijakan publik maupun informasi publik, yang tidak hanya terbatas

media konvensional, juga merambah ke media *elektronik*, seperti Youtube. Dalam penyebaran informasi, upaya yang dilakukan oleh Humas Pemprov DKI Jakarta sudah optimal, terlebih dalam melakukan tugas dan fungsinya termasuk dalam reposisinya guna mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang ada.

Keberhasilan kinerja Humas Pemprov DKI Jakarta tidak lepas dari peran humas pada umumnya yaitu sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi dengan cara memberikan informasi, publikasi dan pelayanan informasi tentang organisasi pada karyawan dan juga stakeholders. Stakeholders Humas Pemprov DKI Jakarta terdiri dari:

- Media massa Lokal dan Nasional

Media massa sebagai pihak yang paling penting dalam membantu Humas Pemprov DKI Jakarta, untuk proses penyebaran informasi yang dilakukannya. Dalam proses ini, segmentasi publik menentukan skala media yang akan digunakan.

- Kalangan Aparatur Terkait

Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga yang cukup besar, membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan segala proses kegiatan Pemerintahannya. Humas Pemprov DKI Jakarta juga harus melakukan proses koordinasi dengan para pejabat yang terkait baik itu di tingkat daerah atau pusat.

- Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI)

Sebagai mitra kerja dalam proses pengelolaan dan penyebaran informasi, KPTI dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam keberhasilan tugas dan fungsi Humas Pemprov DKI Jakarta, salah satu fungsi dari KPTI yang memberi sumbangsih besar yaitu pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

- Klub Sejuta Information Technology (KSIT)

KSIT merupakan salah satu mitra kerja Humas Pemprov DKI Jakarta selain KPTI. Fungsi yang dijalankan keduanya sama, namun KSIT bersifat independen sehingga pusat informasi mengenai keluhan ataupun saran dari masyarakat DKI Jakarta dapat tersalurkan secara pribadi kepada pihak Humas Pemprov DKI Jakarta.

- 10 Biro Sekda Kantor Pusat

Humas Pemprov DKI Jakarta menjadikan 10 Biro Sekda Kantor Pusat sebagai pusat informasi mengenai kebijakan ataupun peraturan serta ketentuan yang terbaru oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta, terutama yang berkaitan langsung dengan biro tersebut. Biro yang termasuk didalamnya yaitu, Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Perekonomian, Biro Tata Pemerintahan, Biro Umum, Biro Administrasi Sekretariat Daerah, Biro Hukum, dan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.

- Perusahaan Swasta Penyedia Jasa Iklan

Media komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemprov DKI Jakarta tidak lepas dari terjalinnya sinergitas antar Pemprov dan Perusahaan Swasta terutama yang bergerak di bidang jasa iklan. Seperti pemasangan informasi di videotron, papan reklame, televisi dan radio.

- Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Kehumasan

Bentuk kerjasama antara Humas Pemprov DKI Jakarta dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kehumasan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas kinerja SDM. Penyaluran SDM yang

berkualitas dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan komunikasi Humas Pemprov DKI Jakarta.

- Karyawan Pemprov DKI Jakarta

Sebagai pihak yang turut mendukung dalam Humas Pemprov DKI Jakarta, maka karyawan Pemprov DKI Jakarta dianggap sebagai elemen penting dalam proses perolehan dan penyebaran informasi.

- Masyarakat DKI Jakarta.

Dengan menjadikan masyarakat sebagai sumber dan sasaran informasi, maka hubungan baik antara Humas Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta khususnya dapat mehadirkan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Penulis menjadi tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh kinerja Humas Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan jurusan yang penulis tempuh yaitu *Public Relations* sehingga penulis dapat mengaplikasikan apa yang sudah penulis pelajari di universitas, sekaligus menyerap informasi tentang segala hal yang penulis butuhkan supaya penulis dapat paham bagaimana dunia kerja sebagai humas di instansi pemerintah yang berperan untuk membangun citra dan memperbaiki reputasi instansi.

John Doorley dan Fred Garcia (2011, h.4) menjelaskan “*Defines reputation as the sum of the images the various constituencies have of an organization*”

Memilih Instansi Pemerintahan, penulis akhirnya menetapkan untuk mencari pengalaman dan menggali informasi sebanyak mungkin di instansi pemerintahan yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), instansi pemerintahan yang berada di pusat kota dengan mengambil spesifikasi

bagian Kehumasan Dinas Komunikasi dan informasi (Diskominfo) Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Rosady (2014. h. 109) Mengenai tugas pokok dan tanggung jawab seorang Humas/ PR adalah bertindak sebagai komunikator (narasumber) untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah (*back up the government work program supporting*), memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif (*good relationship*), konsep kerja yang terencana baik (*work program concept*), hingga mampu menciptakan citra baik, bagi lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif (*good image maker and positive of public opinion*).

Dalam setiap perusahaan baik pemerintah maupun swasta pasti saja memerlukan divisi-divisi terkait untuk membantu berjalannya organisasi. Antara lain yaitu divisi kehumasan, berisikan pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan komunikasi untuk membuat suatu strategi dalam membangun proses pertukaran informasi dan komunikasi agar terjadinya kesepahaman antara pihak instansi dengan masyarakat. Demi menumbuhkan rasa kepercayaan dan citra positif dari instansi itu sendiri, bersama ini penulis tergabung dalam Humas Pemprov DKI Jakarta dalam pengabdian kerja magang. Dengan semakin majunya dunia akademis, penulis berharap ilmu tentang *Public Relations* akan disadari dan dibutuhkan oleh setiap Perusahaan atau Instansi dalam membangun citra.

Lattimore, dkk. (2007, hal. 4) menjelaskan “*Public Relations is a leadership and management function that helps achieve organizational objectives, define philosophy, and facilitate organizational. public relations practitioners communicate with all relevant internal and external publics to develop positive relationships and to create consistency between organizational goals and societal expectations*”

Ada juga definisi Hubungan Masyarakat Pemerintahan menurut Frazier Moore (2000 dikutip dalam Sunarto, 2013, h. 61) menjelaskan tugas dan fungsi humas pemerintah bertumpu pada dua hal. *Pertama*, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang akan dan telah dilakukan. *Kedua*, ada kebutuhan bagi para pejabat pemerintah menerima masukan persoalan baru, dan tekanan sosial untuk memperoleh peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pentingnya kehadiran Humas/ PR dalam suatu instansi menggambarkan bahwa divisi yang ada adalah divisi yang diperhitungkan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada didalam pemerintahan. Humas dipaksa harus selalu sigap dalam menjadi jembatan atau wadah komunikasi antara instansi dengan masyarakat, memberikan tanggapan, menyelesaikan permasalahan dan mengatasi kerancuan informasi secara cepat dan jelas.

Dengan mengetahui fungsi PR yang ternyata sangat strategis dan dibutuhkan oleh instansi pemerintahan, maka diharapkan seluruh pekerja memahami benar apa itu fungsi Humas/ PR, sehingga semua tenaga profesional humas di instansi pemerintahan dapat bekerja secara maksimal.

Maka dapat dipahami secara jelas fungsi Humas/ *Public Relations* dalam instansi pemerintahan ialah sebagai penyalur informasi, jembatan untuk berkomunikasi mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan instansi pemerintahan agar masyarakat menjadi teredukasi dan segala kinerja humas dapat direncanakan dengan matang.

Dalam menjalankan kegiatan komunikasi bagi seorang humas, hal yang paling penting dalam membantu tugasnya yaitu dalam memaksimalan fungsi Media PR. Dalam lingkup Humas Pemprov DKI Jakarta, penulisan media PR yang konten dan penulisannya dapat dikontrol hanyalah Berita Jakarta, yang merupakan milik Pemrov DKI Jakarta sehingga semua isi pemberitaanya dapat dikontrol oleh Humas Pemprov DKI Jakarta.

Dengan terbatasnya pengontrolan media terhadap pemberitaan terutama mengenai Pemprov DKI Jakarta, khususnya penulisan pemberitaan yang tidak dapat diatur oleh Humas Pemprov DKI Jakarta seperti Kompas, Detik, Harian Terbit, Merdeka, Suara Rakyat, Republika, Sindo, Metro Tv, Koran Jakarta, Aktual, dan Pos Kota maka fungsi media monitoring dilakukan dengan seoptimal mungkin.

Cutlip, Center dan Broom (2009, h.456) menjelaskan mengenai *nonprofit organizations exists as a special category of organizations in the tax code in recognition that society is “delegating public tasks to private group.”*

Diakui atau tidak peran Humas/ PR sekarang ini masih belum berperan maksimal dalam melaksanakan tugas. Akibat keterbatasan SDM yang kurang menguasai pekerjaannya, sehingga dalam setiap penugasannya menjadi bias, kurang matang, dan peran dari humas menjadi kurang kuat. Maka diharapkan untuk seluruh humas di pemerintahan untuk terus belajar agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai secara optimal.

Menarik kesimpulan dari yang ada diatas, bahwa humas dalam pemerintahan atau *government PR* dikerjakan tentu tidak sama dengan *corporate public relations* di industri swasta. Itu jelas berbeda, karena segmentasi dan tujuan dari perusahaan dan instansi yang berbeda, dimana perusahaan swasta memfokuskan pada keuntungan perusahaan dan menaikkan citra positif sedangkan instansi pemerintahan yang nonprofit lebih memfokuskan pada strategi menjalani hubungan baik dengan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan. Salah satu caranya ialah pihak Pemprov DKI Jakarta yang melakukan *Public Policy* dan segera mungkin menyampaikannya kepada masyarakat, agar kepercayaan masyarakat akan tetap kuat kepada kinerja Pemprov DKI Jakarta yang telah dipilih.

## 1.2 Tujuan Kerja Magang

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penulis melakukan praktik kerja magang untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem kerja humas di instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Kegiatan kerja magang yang penulis lakukan di Diskominfo Provinsi DKI Jakarta selama 41 hari kerja. Mulai dari tanggal 26 Juli sampai dengan 22 September 2016.

Waktu kerja penulis ialah mulai dari pukul 08.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis diharapkan memiliki waktu-waktu yang fleksibel. Demi menyesuaikan kebutuhan liputan ke lapangan, atau apabila ada agenda *shooting* yang biasa dilakukan pada di hari Sabtu atau Minggu untuk keperluan pembuatan iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Tim dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi.

Pengisian absen kerja magang dilakukan pada saat pulang/ waktu kerja habis dan ditanda tangani oleh Menta Basita Bangun sendiri selaku pembimbing lapangan dan Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta.

Selanjutnya pekerjaan yang peserta kerja magang lakukan akan diatur oleh setiap kepala dari 6 Divisi Kehumasan. Diantaranya yaitu Dhini Gilang Prastanti selaku Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi, Syali Gestanon selaku Kepala Seksi Analisis Media Monitoring Berita, Bima Agung selaku Kepala Seksi Informasi Publik, dan yang terakhir Harry Sanjaya selaku Kepala Seksi Data dan Informasi dan Kepala Seksi Penerbitan dan Media Luar Ruang.

Dalam bimbingan dari Harry Sanjaya, peserta kerja magang tidak merasakan banyak bekerja didalam Kepala Seksi (Kasi) tersebut, dikarenakan dari kedua Kasi tersebut sudah terlalu banyak peserta magang lainnya sehingga penugasan bagi peserta magang menjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah tercantum didalam jadwal magang mahasiswa.

Disana, mahasiswa magang dilepas dan diberi beban kerja tergantung pada divisi mana yang sedang kosong. Apabila divisi tersebut sudah terisi peserta magang yang lain maka konsekuensinya penulis harus dipindahkan ke divisi yang sedang tidak ada peserta magangnya. Sehingga, penulis tidak sempat mendalami kerja magang di Seksi Penerbitan dan Media Luar Ruang dan Seksi Data dan Informasi.

Adapun dalam pelaksanaan kerja magang, penulis harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak kampus. Tahapan pertama yang harus penulis lakukan ialah pengambilan SKS, penulis mengumpulkan Kartu Rencana Studi (KRS) diawal semester 7. Setelahnya, penulis melakukan *submission Curriculum Vitae* ke beberapa target Perusahaan dan Instansi yang diharapkan oleh penulis untuk menjadi tempat kerja magang bagi penulis.

Pada tahap pelamaran penulis melakukan sebanyak 2 kali pelamaran, sampai akhirnya penulis diterima di salah satu instansi pemerintahan. Tahap yang penulis lakukan ialah pengisian KM 1 dari pihak fakultas sebagai permohonan izin untuk melakukan praktik kerja magang. Setelah ditandatangani oleh kepala program studi, penulis mendapati KM 2 dari sekretaris Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara yang salinannya penulis lampirkan bersamaan *Curriculum Vitae* (CV) kepada instansi yang penulis tuju.

Proses pelamaran kerja magang di Dinas Komunikasi dan Informatika/ (Diskominfo) Provinsi DKI Jakarta, penulis lakukan dengan cara langsung mendatangi kantor dengan membawa surat pengantar dari kampus dan CV. Penolakan terjadi disana akibat terlalu banyak CV yang masuk, namun kesempatan penulis dapatkan saat itu ketika pihak Diskominfo menawarkan penulis untuk datang kembali dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 6 Juni

2016. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan presentasi dengan bahan seputar pengetahuan penulis tentang Pemprov DKI Jakarta dan tujuan penulis ingin melakukan kerja magang. Setelah penulis melakukan presentasi, penulis dinyatakan diterima dan dapat melakukan kerja magang di Diskominfo Pemprov DKI Jakarta dengan surat edaran yang turun, dan dijadwalkan akan mulai magang pada periode bulan Juli.

Setelah pengambilan jadwal, penulis ditetapkan mulai bekerja magang pada tanggal 26 Juli 2016 dengan ditempatkan di divisi pertama yaitu di Analisis dan Monitoring Berita. Penulis diberi kesempatan selama 2 bulan kerja magang dengan ketentuan yang berlaku di Diskominfo Pemprov DKI Jakarta terhitung periode Juli-September 2016.

Pengisian absen dilakukan pada saat sebelum mulai bekerja dan saat pulang kerja di ruang Kepala Bagian Pemberitaan, ditandatangani setiap hari dan setiap bulan oleh Menta Basita Bangun. Pembagian kerja diatur oleh Menta sendiri selaku Sub Bagian Pemberitaan. Selama kurang lebih 2 bulan, yaitu 26 Juli 2016 hingga 22 September 2016 melakukan kerja magang di bagian Pemberitaan. Selanjutnya penulis diwajibkan melakukan pengisian data administrasi baik dari kampus maupun dari pihak Diskominfo sendiri. Oleh pihak Diskominfo, penulis diberi surat keterangan bahwa penulis telah diterima untuk kerja magang di Diskominfo Pemprov DKI Jakarta.

Selanjutnya yang penulis lakukan ialah memberikan surat tersebut kepada pihak kampus sebagai syarat pengambilan lembar-lembar administrasi lainnya. Oleh pihak kampus, penulis diberikan KM 03, KM 04, KM 05, KM 06 dan KM 07 yang wajib penulis isi selama kerja magang berlangsung. Kemudian, akan penulis kumpulkan bersamaan dengan laporan hasil kerja magang.

Selama penulis melakukan kerja magang, penulis diwajibkan mengikuti semua agenda yang ada di Diskominfo mulai dari persoalan absensi, waktu yang fleksibel dengan kegiatan-kegiatan lapangan, sampai kegiatan yang tidak berkesesuaian dengan jadwal penulis. Penulis dipindah-pindah divisi setiap minggunya tergantung pada divisi mana saja yang sedang memerlukan tenaga tambahan. Setelah dari divisi Analisis dan Monitoring Berita, penulis

dipindahkan ke divisi Dokumentasi dan Publikasi, lalu di minggu berikutnya di divisi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan, lalu minggu berikutnya lagi di divisi Informasi Publik, Penerbitan Media Luar Ruang sampai pada divisi Data dan Informasi. Sistem random ini dipilih oleh pihak Diskominfo, agar semua peserta magang yang ada dapat merasakan pengalaman bekerja disemua divisi yang ada di Diskominfo Pemprov DKI Jakarta. Selama berjalannya proses kerja magang, penulis tidak melakukan bimbingan dikarenakan penulis memiliki agenda pekerjaan lain diluar kampus dan diluar tempat magang.

Setelah masa kerja magang selesai, penulis diwajibkan untuk menuliskan laporan kerja magang yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Setelah laporan kerja magang telah selesai dan setidaknya mengikuti bimbingan sebanyak 4 kali, maka penulis diwajibkan untuk mengikuti sidang magang sesuai dengan yang diberlakukan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas kerja magang yang penulis telah lakukan.

